



## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis wajib memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:

#### **1. Permasalahan utama Bidang Industri: Belum berkembangnya industri kreatif**

Keberhasilan industri akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu daerah. Peningkatan sektor industri dapat dilakukan melalui peningkatan industri kreatif, yang ditujukan demi mempereratnya kapasitas industri suatu daerah, lebih tepatnya industri-industri yang memiliki sifat kompetitif unggulan. Dibuatnya rencana meningkatkan sektor industri bisa mengembangkan penghasilan para pemilik serta karyawan industri itu sendiri, dan tak lupa menetapkan struktur industri di pelosok desa agar bisa memberikan suau nilai lebih untuk desa tersebut. Dari bidang Industri tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang**  
**Indutri: Belum Berkembangnya Industri Kreatif**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan indsutri	Rendahnya ketrampilan pelaku industri
	Kurangnya penerapan teknologi dalam pengembnagan IKM

**2. Permasalahan utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor**

Daya saing merupakan salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu daerah di dalam perdagangan nasional. Nilai ekspor yang semakin menurun mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Berau di perdagangan nasional semakin menurun. Kekayaan alam yang melimpah sepertinya kurang berperan dalam peningkatan daya saing Kabupaten Berau. Demikian sebaliknya, jika daya saing meningkat hal ini mengindikasikan bahwa produk lokal Kabupaten Berau memiliki kualitas unggulan sehingga mendapat pasar nya sendiri di luar kabupaten. Dari bidang Perdagangan tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang**  
**Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor**

Permasalahan	Akar Masalah
Masih rendahnya daya saing produk ekspor	Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga
	Belum Optimal nya perlindungan konsumen
	Masih Rendahnya Kualitas dari produk lokal yang diekspor

**3. Permasalahan utama Bidang Koperasi Dan UMKM: Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah**

Koperasi merupakan lembaga yang seharusnya menjadi roda penggerak utama dalam perekonomian suatu daerah. Namun di Kabupaten Berau, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan Koperasi dan UMKM belum dapat berfungsi demikian. Hal ini dikarenakan belum adanya produk-produk lokal daerah yang berkualitas yang dapat dipromosikan menjadi produk unggulan daerah. Serta dari segi modal,



UMKM kesulitan dalam hal permodalan sehingga kurang berkembang. Dari bidang Koperasi dan UMKM tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Koperasi Dan UMKM: Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi	Diversifikasi produk UKM masih terbatas
	fasilitas permodalan belum maksimal
	Kurangnya promosi produk-produk UMKM
	Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan



tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau mengikuti misi kedua yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Dinas Koperindag perlu membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi kedua tersebut. Di dalam misi tersebut terdapat indikator laju pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperindag memiliki kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan dan perindustrian, baik perindustrian besar maupun kecil menengah.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur**

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Kabupaten Berau dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.



## 1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam lima tahun ke depan yaitu 2015-2019, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu: **Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.**

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015- 2019. Penjabaran sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM, serta sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, dengan indikator
  - a. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (ratarata/tahun)
  - b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (ratarata/tahun)
  - c. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (ratarata/tahun)
  - d. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)
2. Meningkatnya daya saing UMKM, dengan indikator:
  - a. Pertumbuhan produktivitas UMKM (ratarata/tahun)



- b. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)
- c. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (target tahun 2019)
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, dengan indikator:
  - a. Pertambahan jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5 tahun)
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, dengan indikator:
  - a. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)
  - b. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun)
  - c. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun)

## 2. Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah:

**“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;



2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional.

Dari visi dan misi diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian adalah:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;
  - Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional;
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri;
  - Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;
  - Penyerapan tenaga kerja IKM.



5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
7. Sasaran Strategis 7 : Menguatnya struktur industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

### **3. Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019**

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen

Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negen yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan



3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa. Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekspor nonmigas;
- Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
- Pertumbuhan ekspor jasa

2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:

- Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
- Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.

3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah:

- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif;

Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) adalah:

- Penurunan index Non - Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)



- Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013); dan
  - Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi (%)
4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding. Indikator peringkat dan skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada 'Simon Anholt Nation Brand Index (NBI). Dalam mendukung peningkatan kinerja promosi diperlukan kelembagaan ekspor yang berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja optimalnya kelembagaan ekspor adalah:
- Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor ( market intelligent dan market brief} oleh dunia usaha;
  - Pendirian Lembaga/ Kantor Perwakilan / Pusat Promosi di dalam dan luar negeri (unit); dan
  - Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.
5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa. Peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektivitas pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor.
6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional adalah:
- Jumlah Pasar Rakyat Tipe A;
  - Jumlah Pasar Rakyat Tipe B;
  - Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
  - Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.



7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya Konsumsi produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri. Dalam konsumsi rumah tangga nasional. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional.
8. Optimalisasi/ Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan Pasar Lelang:
  - Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
  - Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;
  - Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang.
9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - a. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan.
  - b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok adalah koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu pokok adalah Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah.
  - c. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar di Wilayah Perbatasan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengelolaan perdagangan perbatasan adalah persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat.



**10.**Peningkatan Perlindungan Konsumen. Indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa adalah:

- Indeks Keberdayaan Konsumen
- Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (U'ITP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

**11.**Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam negeri adalah:

- Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
- Prosentase Kab/ Kota yang dapat menerbitkan SIUP TOP maksimal 3 Hari

**12.**Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah:

- Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
- Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
- Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih; dan
- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal

**13.**Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan

**14.**Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana struktur wilayah Kabupaten Berau, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau yang mencakup tiga bidang sekaligus antara lain Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM masuk dalam sistem pusat kegiatan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Menurut dokumen RTRW, belum dipetakan kawasan perdagangan secara khusus yang dipetakan, Namun diuraikan pengembangan prasarana perdagangan meliputi:

1. Pembangunan dan pengembangan pasar skala kabupaten berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; dan
2. Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional kecamatan dan pasar tradisional desa.

Pada sektor perindustrian, baik perindustrian kecil maupun perindustrian besar, dipetakan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas pembangunan industri di Kabupaten Berau. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 14.654 (empat belas ribu enam ratus lima puluh empat) hektar meliputi:

#### 1. Peruntukan industri besar

Peruntukan industri besar berupa Kawasan industri Mangkajang di Kecamatan Sambaliung

#### 2. Peruntukan industri menengah

Peruntukan industri menengah meliputi:

##### a. Kawasan peruntukan pabrik es meliputi:

- Kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; dan
- Kampung Giring-giring dan Kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Bidukbiduk

##### b. Kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb

##### c. Kawasan Industri Perikanan Kecamatan Batu Putih.

#### 3. Peruntukan industri kecil dan mikro

Peruntukan industri kecil dan mikro berupa meubel, terasi, batu bata dan olahan perikanan meliputi:

##### a. Kecamatan Pulau Derawan;



- b. Kecamatan Tabalar;
- c. Kecamatan Biatan;
- d. Kecamatan Batu Putih;
- e. Kecamatan Tanjung Redeb;
- f. Kecamatan Sambaliung; dan
- g. Kecamatan Gunung Tabur.

Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan kawasan peruntukan perindustrian di Kabupaten Berau meliputi:

- a. fasilitasi bimbingan teknis dan permodalan industri kecil dan rumah tangga;
- b. pengembangan kluster industri;
- c. pemantapan kawasan peruntukan industri;
- d. penyediaan kapling lahan kawasan industri;
- e. penyusunan perda tentang pengelolaan kawasan industri;
- f. pembangunan prasarana dan sarana kawasan industri; dan
- g. pengembangan kelembagaan pengelola dan jejaring industri.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Berau dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau antara lain:

#### **1. Bidang Koperasi**

Strategi Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diperlukan perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi dan produktivitas usahanya. Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Terbukanya pangsa pasar global untuk produk Koperasi dan UMKM.
- b. Rendahnya daya saing produk KUMKM.



- c. Menurunnya citra jati diri Koperasi dan UMKM sebagai akibat adanya black market .
- d. Kebijakan perbankan yang belum memihak pada KUMKM (suku bunga relatif tinggi).
- e. Kemampuan SDM KUMKM yang belum memadai.
- f. Tingkat inflasi yang relatif tinggi.
1. Masih adanya pelanggaran terhadap HAKI.

## 2. Bidang Perindustrian

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perindustrian di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Pengaruh yang paling nyata dari isu global tersebut adalah terbukanya pasar lokal dan adanya kesepakatan perdagangan antar kawasan seperti WTO, NAFTA, AFTA, ICFTA, merupakan isu strategis yang paling krusial saat ini. Terjadinya aliran barang – jasa maupun aliran informasi tanpa batas secara timbal balik antara negara negara anggota kesepakatan termasuk Indonesia, dan ironisnya kejadian ini cenderung menekan perkembangan usaha industri kita. Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Industri Nasional maupun di daerah adalah kecenderungan semakin maraknya black market, keamanan nasional yang tidak menentu, isu kepastian hukum dan isu lingkungan hidup, isu isu ini dalam satu hal merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan industri, akan tetapi dalam kondisi serba keterbatasan, baik kemampuan SDM, keterbatasan sarana perasarana dan beberapa kebijakan nasional yang kurang kondusif bagi pengembangan industri nasional, justru isu- isu ini menjadi tantangan dan bahkan penghambat perkembangan pembangunan industri.
- b. Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Berau dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi. Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Berau didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga



belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

- c. Disisi lain industri menengah dan besar banyak yang belum mampu memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan (industri hijau) yang meliputi pemilihan bahan baku , bahan penolong dan energi, proses produksi, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Padahal setiap industri wajib melaksanakan kegiatan produksi yang ramah terhadap lingkungan.

### **3. Bidang Perdagangan**

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perdagangan di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Menjamurnya keberadaan Toko Modern, pada prinsipnya kita tidak bisa menolak permohonan perijinan pendirian toko modern tersebut selama toko tersebut bisa memenuhi semua persyaratan dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan.
- b. Kenaikan harga Bahan Pokok menjelang Hari Besar dan Keagamaan. Menjelang Hari Hari Besar dan Keagamaan terjadi Kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan yang dikarenakan volume kebutuhan masyarakat yang meningkat dan musim yang kurang mendukung. Hal ini ditindaklanjuti dengan operasi pasar atau pemantauan harga barang yang telah rutin dilakukan.
- c. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen. Konsumen dan pelaku usaha secara nyata mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, namun belum semua pelaku usaha menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan usaha yang diselenggarakannya. Dilain sisi adanya pelaku usaha yang nakal juga dipengaruhi oleh belum mengertinya konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Sementara itu disisi lain dengan adanya globalisasi perdagangan seharusnya kita memberikan pengetahuan



kepada masyarakat untuk dapat mengerti haknya. Sehingga perjanjian ekonomi regional dan global tersebut tidak merugikan masyarakat kita.